



IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Refi Amelia, Deah Irena, Siti Tiara Maulia
Universitas Jambi
refiamelia9@gmail.com

Abstract

Western democracy, sparked by the French Revolution, gave people not real freedom, but the power of capitalism. Therefore, political democracy alone cannot achieve true democracy, namely justice for the people. There must also be economic loss, on the premise that all the income that makes the lives of the many people possible must be applied under the responsibility of the many people. Why is democracy always an issue and a moral choice in political struggles? People have a moral weakness in the form of the power to dominate and control others. because recognizing When this tendency occurs is inherent in those seeking to seize power, and there are no control mechanisms to control and control it, people usually become victims.

Article History

Received: 15 Maret 2023

Reviewed: 13 April 2023

Published: 28 April 2023

Key Words

*Conception, Implementation,
Democracy, Indonesian Politics*

Abstrak

Demokrasi Barat, yang dicetuskan oleh Revolusi Prancis, tidak memberikan kemerdekaan sejati kepada rakyat, tetapi kekuatan kapitalisme. Oleh karena itu, demokrasi politik saja tidak dapat mencapai demokrasi sejati, yaitu keadilan bagi rakyat. Kerugian ekonomi juga harus ada, dengan dasar pemikiran bahwa semua pendapatan yang memungkinkan hidup banyak orang harus diterapkan di bawah tanggung jawab banyak orang. Mengapa demokrasi selalu menjadi isu dan pilihan moral dalam perjuangan politik? Orang memiliki kelemahan moral berupa kekuatan untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain. karena mengakui Ketika kecenderungan ini terjadi melekat pada mereka yang berusaha merebut kekuasaan, dan tidak ada mekanisme kontrol untuk mengontrol dan mengendalikannya, orang biasanya menjadi korban.

Sejarah Artikel

Received: 15 Maret 2023

Reviewed: 13 April 2023

Published: 28 April 2023

Kata Kunci

*Konsepsi, Implementasi,
Demokrasi, Politik Indonesia*

Pendahuluan

Dummy demokrasi Barat yang dikembangkan rakyat saat ini dan banyak yang dilindunginya bukanlah pencapaian politik yang tiba-tiba. Situasi ini merupakan hasil dari proses sejarah yang sangat panjang. Ini telah menelan biaya jutaan jiwa manusia sampai etika politik yang lebih beradab dilembagakan. Demikian pula kemerdekaan negara Indonesia tidak diperoleh dengan sia-sia, tetapi harus direngkuh melalui perjuangannya untuk bertahan hidup dan memberontak melawan imperialisme Barat yang diklaim sebagai negara yang beradab.

Pengalaman bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia masih tergolong sedikit. Seperti lahan perkebunan, lanskap dan ladang politik Indonesia merupakan proses simbiosis kimiawi antara benih demokrasi liberal yang diimpor dari Barat dan lahan garapan Indonesia yang dulu subur bagi pohon-pohon feodal.

Berbeda dengan sayuran yang bersifat objektif dan tumbuh secara linier menurut hukum alam, dunia politik menawarkan berbagai kemungkinan yang sulit diprediksi, karena



setiap orang memiliki ambisi, kebebasan, dan kebebasan. Ini adalah dunia intersubjektif. Dalam masyarakat yang lembaga dan demokrasinya telah terbangun, setiap partai politik yang berkuasa terikat oleh manifestonya, dan program serta mekanisme yang diberikan kepada masyarakat selama masa pemilihan telah tersedia, sehingga pembinaan dan pengarahannya politik dari pemilihan ke pemilihan tidak sulit untuk dilakukan. membaca. kampanye. Namun di negara yang masih terbelakang, seperti Indonesia, yang telah berada di bawah kekuasaan kerajaan dan kolonial selama ratusan tahun, landasan spiritual dan budayanya lebih kepada individualitas individu daripada sistem politik nasional yang impersonal. Ini mendorong lahirnya kepemimpinan yang menindas. Dalam konteks Indonesia, tentu saja, sejak kelahirannya, para pemimpin negara telah berupaya meletakkan dasar-dasar birokrasi negara yang modern. Tanpa penyangga tanah, kita harus bekerja keras mendobrak bebatuan yang ada agar akar-akar benih demokrasi bisa tumbuh. Itu dapat menembus dan dengan kuat memperbaiki dan mendukung pohon di bidang bertingkat. Demokrasi daun-dan-buah di mana orang berlindung.

Padahal, gagasan demokrasi berasal dari negara-negara Barat, terutama Inggris, Amerika, dan Prancis. Ali Mudhafir (2008:47) Liberalisme adalah aliran filsafat yang membela kebebasan individu melawan kekuasaan absolut. Kebebasan ini mencakup bidang agama, ekonomi, dan politik. Dan liberalisme menjadi moral tertinggi bagi kemajuan bersama, kebebasan individu dalam kehidupan berbangsa. Saat itu, yang melahirkan nasionalisme dan demokrasi dalam kehidupan politik melahirkan tatanan kapitalis dalam kehidupan ekonomi, dan semboyannya adalah "Produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat mengatur keharmonisan dunia". kebebasan teritorial dan agama melalui sekularisme; Hatta (2010:14) menyatakan bahwa kebebasan individu ini nantinya akan menimbulkan penderitaan sosial, karena kedaulatan hanya berada di ibu kota pemilik, tetapi kritik berikut dapat kita baca sebagai berikut:

“Demokrasi Barat yang lahir dari Revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan sejati bagi rakyat, melainkan membawa kekuatan kapitalisme. Hanya demokrasi politik yang mencapai demokrasi sejati, yaitu keadilan bagi rakyat.” Harus ada kerugian ekonomi juga, dengan alasan semua pendapatan yang menghidupi banyak orang juga harus menjadi tanggung jawab banyak orang. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Barat hanya menguntungkan investor, Hatta menambahkan, demokrasi kapitalis ini harus ditolak dan tidak cocok untuk itu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas.

Berikutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga adalah analisis dokumen baik berupa jurnal, laporan penelitian, dan data-data resmi yang dipublikasikan.



Prastowo (2010) mengatakan bahwa untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya, maka tehnik pengumpulan data tidak hanya satu macam saja tetapi juga didukung dengan tehnik pengumpulan data yang lainnya.

Pembahasan

Memahami Demokrasi Pancasila Singkatnya, demokrasi pancasila memiliki beberapa pengertian seperti:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, berkepribadian Indonesia, tidak rasional, berunsur kesadaran beragama dan berdasarkan kebenaran, cinta kasih dan keluhuran.
2. Dalam demokrasi pancasila, sistem penyelenggaraan negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat
3. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak mutlak dan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial
4. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan universalitas cita-cita demokrasi dengan semangat aspirasi rakyat Indonesia dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas

Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila, Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia dan pengendalian pemerintahan provinsi. mengatakan ada. organisasi kekuatan sosial politik, organisasi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial lainnya, lembaga negara baik pusat maupun daerah.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip Demokrasi:

1. Kebebasan

Kebebasan dan kesetaraan adalah landasan demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari usaha rakyat tanpa kesulitan dari penguasa. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi dan diberikan akses bersama dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang tersirat dalam demokrasi Pancasila



bukan berarti liberalisme pejuang kemerdekaan yang berkembang di Barat, melainkan kebebasan untuk tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain.

2). Kedaulatan rakyat (kedaulatan rakyat).

Dengan konsep kerugian negara, esensi politik adalah kehendak rakyat dan keuntungan rakyat. Jenis mekanisme ini menyelesaikan dua hal. Pertama, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan kedua, memastikan hal itu kepentingan rakyat.

3).Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

- a. Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif.
- b. Badan kehakiman / peradilan yang bebas dan merdeka. 1198-
- c. Pers yang bebas
- d. Prinsip Negara hukum
- e. Sistem dwi partai atau multi partai.
- f. Pemilihan umum yang demokratis
- g. Prinsip mayoritas.
- h. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas

Di negara kita, prinsip-prinsip demokrasi ditata sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, meskipun harus dikatakan hanya terbatas pada prosedur demokrasi, sedangkan dalam proses pengambilan keputusan, pemungutan suara lebih diutamakan daripada konsultasi. Konsensus sebenarnya adalah prinsip asli demokrasi Indonesia. Praktik demokrasi yang tidak dilandasi oleh state of mind yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa hanyalah omong kosong belaka.

unsur demokrasi.

Beberapa unsur demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah:

1. Menurut Sargent, Lyman Tower (1987), partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, derajat persamaan di antara manusia, yaitu derajat kebebasan dan kemerdekaan Kepemilikan warga negara, representasi, kekuasaan mayoritas.
2. Menurut Afan Gaffar (1999), akuntabilitas, pergantian kekuasaan, rekrutmen politik terbuka, hak pilih universal, dan hak-hak dasar.
3. Menurut Merriam Budiardjo (1977), perwujudan nilai-nilai demokrasi memerlukan lembaga-lembaga demokrasi: pemerintah yang bertanggung jawab, dewan rakyat, organisasi politik, pers, media massa, dan peradilan yang mandiri. perlu didirikan.



4. Menurut Frans Magnis Suseno (1997), ia memiliki lima ciri pokok negara demokrasi. Lima klaster demokrasinya adalah supremasi hukum, pemerintahan di bawah pemerintahan yang sebenarnya, pemilihan umum yang bebas, kekuasaan mayoritas, dan jaminan hak-hak demokrasi.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai-nilai asli Indonesia dan dikaitkan dengan nilai-nilai sebagai berikut: B. Desa demokratis, musyawarah kolektif, musyawarah, mufakat, gotong royong dan istilah-istilah terkait lainnya. Tujuannya agar konsep demokrasi berpijak pada pengalaman sosiologis yang sesuai dengan cara hidup masyarakat Indonesia asli, bukan alien yang datang dari Barat dan dipaksakan pada realitas keseharian masyarakat Indonesia.

Masyarakat adat yang dimaksud di sini adalah bentuk-bentuk kehidupan komunal yang telah ada selama berabad-abad di kepulauan Nusantara, termasuk desa-desa terkecil seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Pekong di Lampung dan Subak. Ini terdiri dari unit hidup yang berbeda. Masyarakat adat ini memiliki seperangkat nilai spiritual dan moral yang homogen, struktural dan kolektif, masing-masing dengan sistem budayanya sendiri dan dijalankan secara demokratis. Artinya, demokrasi langsung yang ada di negara-kota Yunani kuno 25 abad yang lalu. Proses transformasi nilai demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia tersebut mengalami beberapa priderisasi dalam proses implementasinya sebagai suatu keniscayaan, dan tahapan tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima priode :

1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945-1950.
2. Pelaksanaan demokrasi masa orde lama.
 - a. Masa demokrasi liberal 1950-1959.
 - b. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965.
3. Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun 1966-1998.
4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999.
5. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang.



Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi

Pada tahun 1945 hingga 1950, Indonesia berperang dengan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. manusia. Pemerintahan 1945-1950 menunjukkan keinginan kuat para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut, banyak langkah yang dilakukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Pedoman ini adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 Tentang Perubahan Fungsi KNIP Menjadi Fungsi Parlemen.
- b. Pengumuman Pemerintah tanggal 3 November 1945 Tentang Pendirian Partai Politik.
- c. Pemberitahuan Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 Tentang Perubahan Kabinet Menjadi Kabinet Parlementer. Kebijakan ini mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Cita-cita dan proses demokrasi era ini digagalkan oleh revolusi fisik melawan Belanda dan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.

1. Pelaksanaan Demokrasi masa Orde Lama.

Masa Demokrasi Liberal

Proses demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a). Dominannya politik aliran.
- b). Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
- c). Tidak mempunyai para anggota konstituante dalam bersidang menetapkan dasar Negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Dengan turunnya dekret presiden tersebut, berakhirilah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. selanjutnya Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin.



Masa Demokrasi Terpimpin.

Masa antar tahun 1959-1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPR S No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom.

Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut:

- a). Dominasi presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- b). Terbatasnya peran partai politik.
- c). Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.

2. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru.

Masa Orde baru dimulai tahun 1966. Demokrasi masa orde baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegiatan politik dan pemberi legalitas bagi seluruh anggota pemerintah dan Negara. Akibatnya, secara substantive tidak ada perkembangan demokrasi dan justru penurunan derajat demokrasi.

Orde baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitas pemerintahan dan kemajuan ekonomi. Namun, makin lama semakin jauh dari semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Pemerintahan orde baru berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaannya pada tanggal 29 Mei 1998. Berakhirnya orde baru membuka jalan munculnya Masa Transisi dan periode Reformasi.

3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi.

Masa transisi berlangsung antara 1998-1999. Pada masa transisi banyak sekali pembangunan dan perkembangan kearah kehidupan Negara demokrasi. Beberapa pembangunan kearah demokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Keluarnya ketetapan MPR RI Dalam siding istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional.
- b). Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas.



- c). Melaksanakan pemilihan umum 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik.
- d). Terbukanya kesempatan yang luas dan untuk warga Negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga sering euphoria demokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi.

Di masa Reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip- prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia.

Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945., Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi Negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi.

KESIMPULAN

1. Konsep demokrasi pancasila tidak diturunkan dari konsep individualisme yang berkembang di Barat. Demokrasi berdampak kuat pada kekayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila yang muncul adalah demokrasi yang dilandasi paham persatuan dan kekeluargaan, dan muatan model demokrasi ini meliputi sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, pertimbangan musyawarah mufakat dalam keputusan politik, dan saling mendukung atau gotong royong. adalah kebiasaan
2. Praktik demokrasi Pancasila di Indonesia lebih bercirikan nasionalisme religius daripada nasionalisme sekuler. Anda bisa melihatnya di injeksi pertama.

Daftar Pustaka

- Adian Donny Grahral, Demokrasi Substansial, Jakarta: Koekoesan, Jakarta, 2010. Hidayat, Komaruddin, Tragedi Raja Midas, Jakarta: Paramadina, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tatanegara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suleman, Zulfikri, Demokrasi Untuk Indonesia, Jakarta: Kompas, 2010.
- Nasution, Adnan Buyung. 2010. Demokrasi Konstitusional. Jakarta: Kompas, 2010.
- Mudhofir, Ali, Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat, Jakarta: Liberti, 2008.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

ISSN : 2961-8754

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan,3Tahun 2023

Vol 3 , No1 .

Latif, Yudi, Negara Paripurna (historis, rasionalitas, dan aktualitas pancasila). Jakarta: Kompas Gramedia,2011.